

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara Kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta KM^2 , sektor maritim (kelautan) menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan. Padahal jika potensi pembangunan (ekonomi) Kelautan Indonesia dikelola dengan inovatif dan baik, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan, dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi Negara dan masyarakat Indonesia. Pelabuhan Perikanan diperlukan dalam rangka menunjang usaha motorisasi serta pengembangan ekonomi perikanan secara menyeluruh terutama menunjang perkembangan industri baik hulu maupun hilir, sehingga diharapkan tercapai pemanfaatan sumberdaya perikanan yang seimbang, merata dan proposional (Nurdyana *et al.*, 2013).

Menurut **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2010)** menyebutkan bahwa pelabuhan yang ada di Indonesia ada beberapa jenis pelabuhan yaitu, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan yang terakhir adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pelabuhan Perikanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti : pedagang, pabrik pengolah, restoran, dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya sebagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat disekitar Pelabuhan Perikanan (Kusyanto *et al.*, 2006).

Perlu dipertimbangkan pula bahwa keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan akan sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang ditetapkan oleh instansi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sinergi dan dukungan antarsektoral yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan oleh karena itu perlu membangun “*corporate culture*” dan termasuk kemitraan pusat dengan daerah maupun instansi terkait lainnya dalam lingkup sektor kelautan dan perikanan (Dahuri, 2002).

Kabupaten Pesisir Selatan terletak antara 0° 59' - 2° 28,6' Lintang Selatan dan 100° 19' - 101° 18' Bujur Timur di pesisir pantai sebelah barat Pulau Sumatera. Selain berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Kabupaten Pesisir Selatan juga berbatasan dengan 5 daerah administrasi sekaligus. Bagian utara Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan langsung dengan Kota Padang, bagian selatan dengan Provinsi Bengkulu, serta bagian timur dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Provinsi Jambi.

Potensi Sumberdaya perikanan merupakan salah satu andalan Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai panjang garis pantai lebih kurang 234 Km² dengan luas perairan laut 84.312 Km², potensi lestari sekitar 95.000 ton/tahun, yang terdiri dari: ikan pelagis besar/kecil 34.008 ton/tahun, ikan domersal/karang 60.435,73 ton/tahun, udang-udangan 556,27 ton/tahun dan ikan hias laut sekitar 14.516.440 ekor/tahun.

Kabupaten Pesisir Selatan juga merupakan kabupaten/kota kedua dengan wilayah terluas di Provinsi Sumatera Barat setelah Kepulauan Mentawai. Luas wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan tercatat sebesar 5.749,89 km² dan terbagi menjadi 15 kecamatan, salah satunya Kecamatan Lengayang yang terletak 55 km dari Ibukota Kabupaten memiliki wilayah terluas sebesar 590,60 km² atau setara dengan 10,27 persen dari total luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. (*BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2020*).

Di Kabupaten Pesisir selatan terdapat pelabuhan tipe D yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pangkalan Pendaratan Ikan tersebut terdapat di daerah Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kambang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan dilihat dari potensi sumberdaya perikanan yang besar yang dihasilkan dari tangkapan nelayan yang didaratkan di PPI Kambang yang mencapai 1.693,158 kg yang didominasi ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Besarnya hasil tangkapan yang didapatkan memungkinkan eksploitasi oleh armada perikanan yang cukup besar dan

jumlah nelayan yang cukup banyak. Namun, yang menjadi permasalahan yang ada di PPI Kambang adalah kondisi PPI Kambang dinilai kurang sinergi karena adanya beberapa kendala yang terdapat pada aktivitas dan fasilitas yang tersedia di PPI Kambang. Kekurangan ini terdapat pada beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga menghambat aktivitas yang ada di PPI Kambang. Dengan adanya kendala tersebut maka harus dirumuskan suatu strategi pengembangan di PPI Kambang dilihat dari potensi sumberdaya perikanan yang ada di PPI Kambang. Dan perlur adanya dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengembangan fasilitas yang ada di PPI Kambang tersebut, dengan harapan keberadaan pelabuhan perikanan dapat menjadi roda penggerak ekonomi perikanan, serta keberadaan fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang aktifitas pendaratan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan Kambang lebih ditingkatkan lagi dalam kelengkapan maupun penggunaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Analisis Pemanfaatan fasilitas fungsional di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat”**

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi bagi instansi terkait maupun lainnya untuk rencana pengembangan selanjutnya di Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) Kambang, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

